



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA (TRIWULAN I)
TAHUN 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ahmad Zunanto Sofyan Efendi, A.Md	Pengelola Kepegawaian	04/04/24	
2.	Dikonsep	Zulfikar Adhitya Kusuma, A.Md	Pengelola Kepegawaian	04/04/24	
3.	Dikonsep	Alexandro J. Pua	Administrasi Perkantoran Subbagian Tata Usaha	04/04/24	
4.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	04/04/24	
5.	Disetujui	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	04/04/24	
6.	Disetujui	Yanuar Efan Thamrin, ST, M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	04/04/24	
7.	Disetujui	Fadjar Rijadi, ST., MT	Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	04/04/24	
8.	Disetujui	Dharmawanto, S.T., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	04/04/24	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LMCK

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA | 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI UTARA



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional

Sebagai Instansi Pemerintah yang mandiri, BPTD Kelas II Sulawesi Utara juga perlu untuk menyusun sebuah Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap Triwulan I sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama Triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja Tahun 2024.

Tujuan penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode Triwulan I, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerjanya

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan ini juga dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Manado 18 April 2024

Kepala Balai,



Sri Hardianto, S.T., M.M.Tr.

NIP. 196712101997031009



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2020 – 2024 mengusung Visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPTD Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020-2024, BPTD Kelas II Sulawesi Utara telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020 - 2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
5. Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2024 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan ini mencakup pelaksanaan sasaran kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 13 Indikator

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara telah melaksanakan dengan baik 3 (Tiga) Indikator Kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$), dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja yang kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$), dan Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100% dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, Pelaksanaan Monitoring yang dilakukan secara berkala, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	11
I.1 Latar Belakang.....	11
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	12
I.3 Sumber Daya Manusia.....	14
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	14
I.5 Sistematika Laporan.....	16
I.6 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS	23
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024)	26
I.7 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	28
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	31
II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	31
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	31
II.3.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	36
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	36
IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	40
IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi.....	42
IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	45
IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	45
IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	48
II.3.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat....	51
IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A.....	51
IKK2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal.....	54
IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.....	54

IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57
IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	60
IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	62
IKK3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	63
IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	63
IKK3.6 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	66
IKK3.7a Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	66
IKK3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	69
IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat ..	69
IKK1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	72
II.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	76
II.4.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024	76
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024	80
II.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	81
II.4.3. Alokasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024	85
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	88
III.1. PENUTUPAN.....	88
III.1.1 Ringkasan Capaian	88

PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

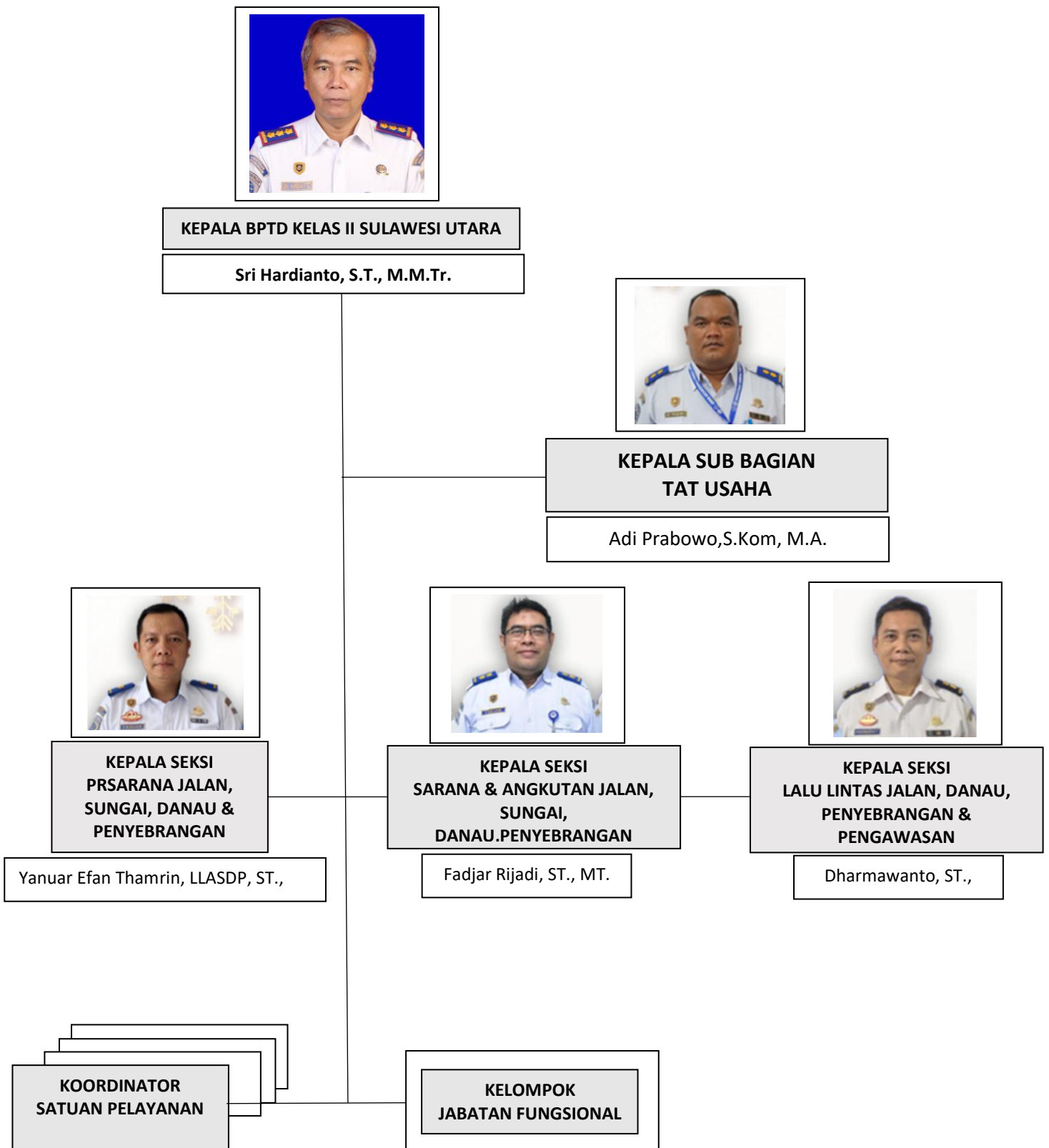
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Undang Undang PM. 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 154 Tahun 2016 tentang tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dan dilakukan pembaharuan pada Peraturan Menteri Perhubungan 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, dan Penyeberangan; Danau,
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan Danau,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan

penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara menaungi sebanyak 270 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kantor Induk / Satuan Pelayanan	ASN	PPNPN
1.	Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara	35	29
2.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Liwas/Malalayang	5	18
3.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tangkoko Bitung	6	17
4.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Boroko	4	14
5.	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bolaang Mongondow	4	14
6.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bitung	5	10
7.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Likupang	6	10
8.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau	6	10
9.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Pananaru	5	8
10.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Melonguane	5	8
11.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Miangas	2	3
12.	Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Wangurer Bitung	5	18
13.	Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Inobonto	5	18

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;

- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009* Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. 154 Tahun 2016
- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
 - 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018 dan dilakukakan pembaharuan pada Peraturan Menteri Perhubungan 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan pelatihan peningkatan kemampuan pegawai (diklat dan bimtek) dalam rangka menunjang kelancaran menjalankan tupoksi di masing-masing bidang Pada Balai pengelola Transportasi Darat.

Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;

6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 *Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024*
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1 SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Transportasi;
 - IKK1.1 Persentase Keberintisan Angkutan Jalan;
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.3.2 SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat;
- IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK2.2 Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3.3 SK.4 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Transportasi;

IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

a.1 Definisi Indikator Kinerja

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)

- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK3.6 Jumlah Fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
 - a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IKK3.7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- IIK3.7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.3.4 SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
- IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja]
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.3.5 SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel
- IKK1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
- a.1 Definisi Indikator Kinerja
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) Pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (Minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

- II.4 Realisasi Anggaran
- II.3.1 Alokasi Anggaran
1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Persumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
 2. Recofusing Anggaran Tahun 2024
 - a. Rincian Revisi Persumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024
- II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024
1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
 4. Analisis Dana Yan Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUPAN

- III.1 Penutupan
- III.1.1 Ringkasan Capaian
- III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;

I.6 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan BPTD Kelas II Sulawesi Utara.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sulawesi Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sulawesi Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis BPTD Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Utara 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis BPTD Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	3
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	5
			IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
			IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	80

		Pelayanan Transportasi	IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
			IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50
			IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	-
			IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	500
			IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-
			IKK 3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	75
			IKK3.7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	-
5	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90

6	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90
---	------	---	-------	--	-------	----

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2024)

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Utara merupakan Kontrak Kinerja antara BPTD Kelas II Sulawesi Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan Indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Dalam perkembangan, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seiring adanya revisi manual Indikator Kinerja Utama yang berlaku di Lingkungan BPTD Kelas II Sulawesi Utara sebagai berikut;

RENCANA KINERJA TAHUN 2024 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	3
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	5
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	80
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	80
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50

		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	-
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	500
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	75
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	-
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	3
		IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	5
		IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	-
		IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	80
		IKK2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	80
SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50
		IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	-
		IKK3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	500
		IKK3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	-

		IKK 3.7 a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	75
		IKK3.7 b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	-
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun Triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Draft Renstra BPTD Kelas II Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra BPTD Kelas II Sulawesi Utara 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Sulawesi Utara Triwulan 1 Tahun 2024

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	TRIWULAN 1		
				T	R	C
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					78,14%
IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100%	24,03	24,03%
IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	3	3 Lokasi	3	100%
IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	5	4 Lokasi	4	80%
IKK1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	-	-	-	0%
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100%	100	100%
IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	15	15 Lokasi	13	86,67%
SK2	Meningkat Pelayaran Transportasi Darat					24,85 %
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	80	80%	32,07	40,09%
IKK2.3	Persentase Perlengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	80	80%	7,69	9,61%
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					44,31%
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100%	1,55	1,55%
IKK3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	50	50%	56,52	113,04%
IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	500	500 Orang	0	0%
IKK3.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	75	75%	47	62,67%
IKK3.7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	-	-	-	0%
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					25%
IKK5	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90 Nilai	22,5	25%
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					25%

IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90 Nilai	22,5	25%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						39,46%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						51,35%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$)						3
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$)						10

Selama Triwulan I Tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 15 IKK yang memiliki Target dan terdapat 2 IKK yang tidak memiliki realisasi, sehingga aktual IKK yang berjalan ada 13 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

II.3.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

BPTD Kelas II Sulawesi Utara merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan, BPTD Kelas II Sulawesi Utara melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Draft Renstra BPTD Kelas II Sulawesi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Kelas II Sulawesi Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Kelas II Sulawesi Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Kelas II Sulawesi Utara dalam IKP membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Kelas II Sulawesi Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Program 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yaitu:

1. IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
2. IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
3. IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi
4. IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda
5. IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
6. IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

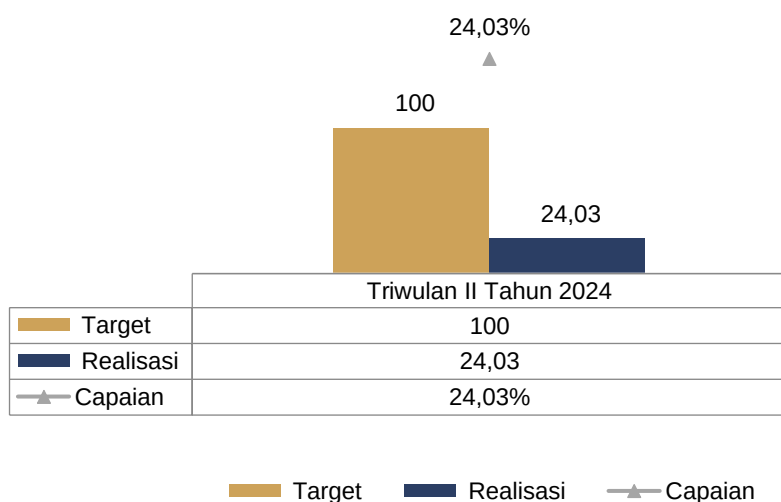
Keterangan :

1. Malalayang – Ratatotok – Molobog
2. Malalayang – Doloduo – Molibagu – Dumagin – Posilagon
3. Paal Dua - Talawaan – Likupang – Marinsow - Tangkoko
4. Paal Dua - Tondano - Kema – Tangkoko

5. Tangkoko - Mahembang – Jiko Blanga
6. Melonguane - Beo - Esang – Gemeh
7. Melonguane – Bowaong Baru - Rainis – Beo
8. Malalayang - Tobabo – Bentenan
9. Malalayang - Lobu – Kalait
10. Melonguane - Beo - Rainis – Gemeh

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebesar 24,03 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja Tahun 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 24,03%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian.



c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP – DRJD 8317 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, target trayek pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara adalah 10 trayek Keperintisan Angkutan Jalan, dengan jumlah target Ritase sebanyak 3824 Ritase.

Penyelenggaraan Subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Petaturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Adapun dua kriteria untuk menetapkan Angkutan Jalan Perintis, yaitu Faktor Finansial dan Keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antar daerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan Kriteria keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan Penyeberangan Perintis atau Angkutan Udara Perintis.

Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. Mencantumkan informasi Trayek dan Tarif pada Terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. Memberikan pelayanan Angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari jumlah kendaraan yang dioperasikan;

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan nasional terhadap Konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan :

1. Terlayannya Aksesibilitas Transportasi Darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang di lalui Trayek Angkutan Perintis;
2. Pemberian Subsidi bagi Angkutan Perintis adalah untuk menghubungkan antara Daerah, Terisolir Terpencil dan Tertinggal agar dapat mengembangkan Potensi Perekonomian Daerah yang terlayani Subsidi Perintis;
3. Keberadaan Bus Keperintisan sangat penting dan diharapkan oleh masyarakat untuk menunjang perekonomian daerah tersebut;
4. Kondisi angkutan yang cukup memuaskan untuk melayani mobilitas masyarakat di daerah tersebut;

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan:

1. Tidak terserapnya Subsidi Angkutan Perintis;
2. Kurangnya Pengawasan sehingga pemberian subsidi tidak maksimal;
3. Jumlah Ritase tidak tercapai;
4. Bencana alam merupakan faktor kegagalan;
5. Realisasi Kinerja

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{919}{3824} \times 100\% = 24,03\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\text{Capaian} = \frac{24,03\%}{100\%} = 24,03 \%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Memiliki Pagu Anggaran Senilai Rp5.438.424.000 dengan Realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp881.403.902 atau mencapai 16%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan dilakukan Sosialisasi berkala terhadap Operator pelaksana Subsidi Angkutan Perintis untuk memenuhi Rit Lintasan Subsidi Perintis dengan baik;
2. Pengawasan dan Monitoring terhadap Pelaksanaan Keperintisan Angkutan jalan dilakukan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik;
3. Akan dilakukan Evaluasi berkala terhadap Rit Subsidi yang tidak terlaksana di karenakan factor cuaca dan kendaraan;
4. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
5. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan Anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a. Definisi Indikator Kinerja

Simpul Transportasi Nasional terdiri dari Terminal Tipe A, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) dan Jumlah Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional); Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara digunakan rumus sebagai berikut:

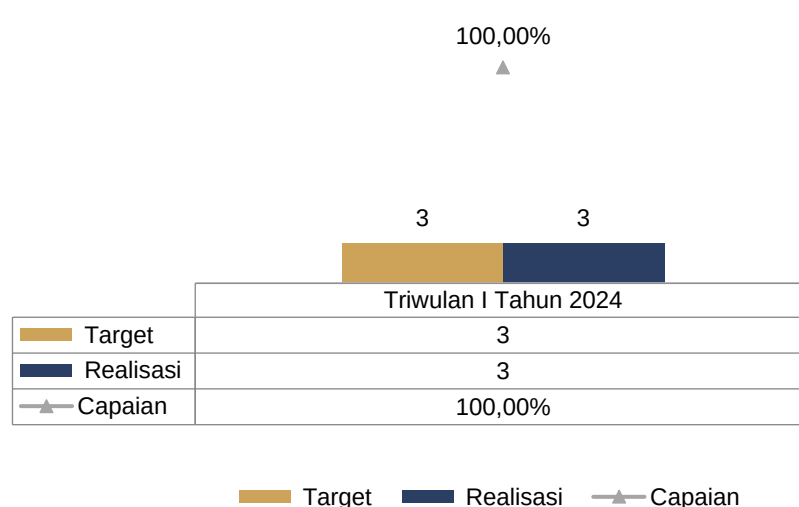
IKK1.2 = Jumlah Simpul Transportasi Nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda

Keterangan:

3 Lokasi Subsidi Angkutan Antarmoda KSPN Likupang :
Pelabuhan Penyeberangan Bitung;
Bandara Samratulangi;
Pelabuhan Penyeberangan Likupang;

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 3 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 3 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian, Gambar III.2 IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.



Gambar III.2 Capaian IKK1.2 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.478/PIR.301/DRJD/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2020, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda pada Tahun 2024 Memiliki Persentase target sebesar 3 Lokasi dengan realisasi sebesar 3 Lokasi sehingga capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda terhadap konektivitas transportasi dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 3 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Subsidi Angkutan Antarmoda menghubungkan daerah-daerah Prioritas untuk memajukan Pariwisata Daerah tersebut.
2. Dengan terlayannya Subsidi Angkutan Antar Moda dapat mempercepat pembangunan SDM di daerah tersebut;
3. Dengan Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda Mempermudah Perjalanan Transportasi Masyarakat yang terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda.

- **Faktor Kendala**

1. Jumlah Ritase Tidak Tercapai;
2. Faktor Cuaca Buruk dapat mempengaruhi Pelayanan Angkutan Antar Moda dikarenakan Bus Damri tidak dapat melewati Lintasan/Rute tersebut;
3. Kendaraan Mengalami Rusak Parah;
4. Sosialisasi yang kurang maksimal sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya angkutan KSPN;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda Tahun 2024 sebagai berikut :

IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda

terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$Capaian = \frac{3}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda pada Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2,841,210,000. dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 150.001.594 atau mencapai 5%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Monitoring dan Pengawasan Untuk Tercapainya Ritase Pelaksanaan Subsidi;
2. Monitoring dan pengawasan akan tetap di laksanakan untuk memastikan subsidi terealisasi dengan tepat;
3. Monitoring dan Pengawasan berkala terhadap Kendaraan yang akan memenuhi Subsidi Antar Moda;
4. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian;

IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi, sedangkan terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai di bangun dan telah melayani Angkutan Barang Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dilingkungan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Untuk menghitung Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$IKK1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi}$$

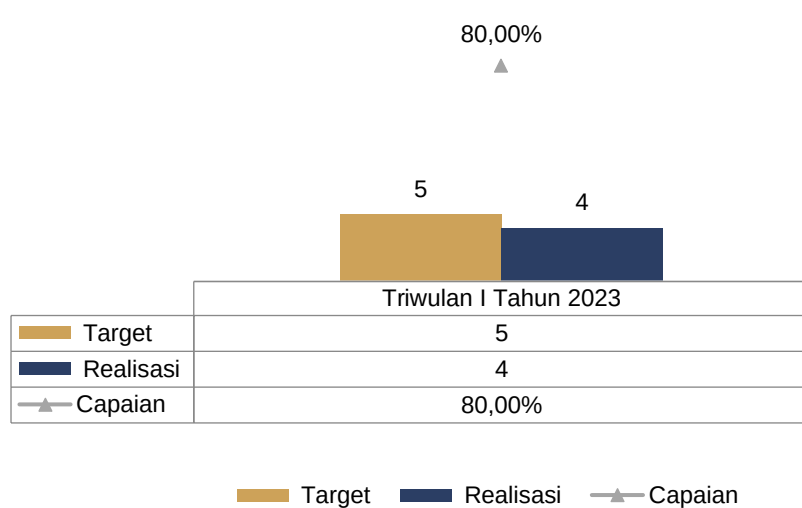
Keterangan:

Terminal Tipe A yang Beroperasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara :

1. Terminal Tipe A Tangkoko Bitung;
2. Terminal Tipe A Malalayang;
3. Terminal Tipe A Boroko;
4. Terminal Tipe A Bolaang Mongondow;
5. Terminal Tipe A Liwas;

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 5 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 80%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian. Gambar III.3 IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar III.3 Grafik Capaian IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan PM Perhubungan Nomor: 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki Persentase capaian sebesar 80% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi terhadap konektivitas transportasi dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 5 lokasi (Terminal Tipe A) yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Dilaksanakan nya pengawasan inventarisir kebutuhan Terminal Tipe A untuk menunjang Operasional Terminal Tipe A;
2. Dilakukan Pemeliharaan Terminal Tipe A secara berkala;
3. Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Terminal Tipe A;
4. Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Terminal Tipe A untuk menjamin keamanan dan Kenyamanan Terminal Tipe A;
5. Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor terhadap Kendaraan AKAP dan AKDP;

6. Tindak lanjut Survey Kepuasan Masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Terminal Tipe A.

- **Faktor Kendala**

1. Kurangnya Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Terminal Tipe A;
2. Pemerintah tidak bisa menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna Jasa Terminal Tipe A;
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam mengelola Terminal Tipe A;
4. Kurangnya pemeliharaan Terminal Tipe A;
5. Kurangnya fasilitas penunjang jalan untuk mencapai lokasi Terminal.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 sebagai berikut :

IKK1.2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi = 4 Lokasi

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{4}{100\%} \times 100\% = 80\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran Senilai Rp 7.597.423.000 dengan realisasi hingga triwulan I Tahun 2024 Rp 987.152.595 atau mencapai 13%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan dilakukan Sosialisasi-Sosialisasi untuk pengguna Jasa untuk tetap menggunakan Jasa Terminal Tipe A agar menjadi salah satu pilihan Bertransportasi dalam berpergian;
2. Akan dilakukan perbaikan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Terwujudnya Terminal Tipe A Serasa Bandara;
3. Akan dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap Operator Bus agar tetap mematuhi Kepentingan bersama yaitu "Keselamatan Bertransportasi"
4. Akan dilakukan Perbaikan Sistem Informasi untuk meningkatkan Kinerja Terminal Tipe A;

5. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Indikator Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

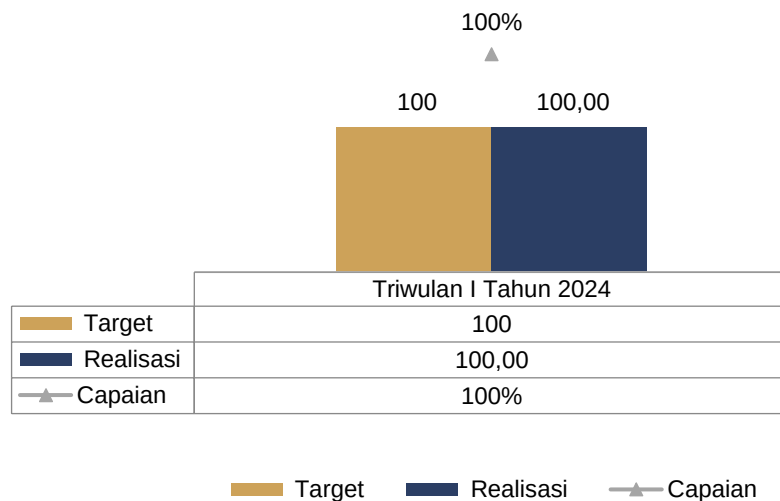
Penetapan Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan :

No	Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
1	Lembeh
2	Mangaran
3	Tagulandang
4	Buhias
5	Siau
6	Pananaru
7	Melonguane
8	Marampit
9	Miangas
10	Biaro
11	Makalehi
12	Kawaluso
13	Marore
14	Musi
Total DTPK : 14	
DTPK Terlayani Subsidi Perintis : 14	
DTPK Belum Terlayani Subsidi Perintis : 14	

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 100%, Pencapaian ini digambarkan pada

Grafik Capaian Gambar III.4 IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.



Gambar III.4 Grafik Capaian IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5856/AP204/DRJD/2018 tentang Perhitungan dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis untuk melayani kepulauan Terluar untuk memenuhi kebutuhan Transportasi Penyeberangan Masyarakat Umum, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2024 Memiliki persentase capaian sebesar 100 % yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini hampir mencapai target yang ditetapkan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target presentase 100 % yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Koordinasi dengan dinas terkait untuk pelayanan angkutan keperintisan.
2. Tindakanjuti Survey Kepuasan Masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan;
3. Akan dilakukan Perbaikan terhadap Sarana dan Prasarana untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan;
4. Tercapainya Kesenambungan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di Daerah Terpencil, Terisolir, dan Tertinggal serta Perbatasan.

- **Faktor Kendala**

1. Faktor Cuaca Buruk dapat mempengaruhi Pelayanan Angkutan Keperintisan Penyeberangan;
2. Faktor kerusakan pada Kapal Angkutan Perintis yang tidak di sengajai;
3. Faktor dokumen berlayar tidak lengkap menyebabkan kapal tidak berangkat;
4. Belum tersedianya Dermaga Kapal Penyeberangan yang memadai;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 46.067.037.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 6.837.502.945 atau mencapai 15%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan di laksanakan koordinasi dengan pihak operator Kapal untuk melengkapi pemenuhan Dokumen sebelum keberangkatan Kapal untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa;
2. Monitoring dan Pengawasan terhadap aspek keselamatan pada Kapal Angkutan Perintis;
3. Akan tetap melakukan perbaikan dalam Sistem Informasi dalam hal pelaporan pelaksanaan Subsidi Angkutan Perintis agar dapat memudahkan Verifikator untuk memverifikasi Laporan setiap Operator Kapal;
4. Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut;
5. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk Angkutan Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan terdiri beberapa kelas (Kelas I, Kelas II dan Kelas III) sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan Umum untuk Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, Waduk dan Terusan, Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan, Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara, Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s, d tahun 2024 (n)

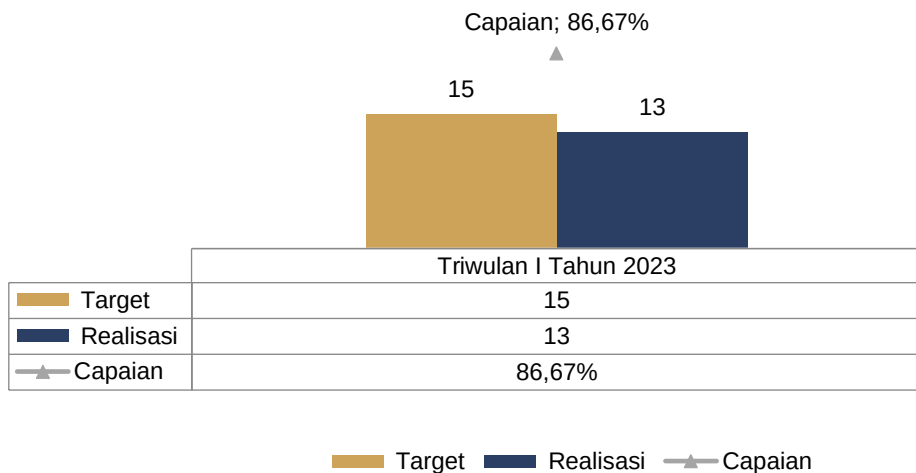
Keterangan:

Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung;
2. Pelabuhan Penyeberangan Amurang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh;
4. Pelabuhan Penyeberangan Likupang;
5. Pelabuhan Penyeberangan Biaro;
6. Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang;
7. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru;
8. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso;
9. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane;
10. Pelabuhan Penyeberangan Marore;
11. Pelabuhan Penyeberangan Musi;
12. Pelabuhan Penyeberangan Marampit;
13. Pelabuhan Penyeberangan Miangas.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebesar 13 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 15 maka Capaian Kinerja mencapai 86,67%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.



Gambar III.5 Grafik Capaian IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Monitoring dan Pengawasan Pelayanan di 13 Lokasi Pelabuhan Penyeberangan, pada persentase Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 86,67% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini tidak mencapai target yang di tetapkan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi terhadap konektivitas transportasi dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 13 pelabuhan yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Pelabuhan Penyeberangan untuk menunjang Operasional Pelabuhan Penyeberangan;
2. Dilakukan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan secara berkala;
3. Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Pelabuhan Penyeberangan;
4. Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Pelabuhan Penyeberangan untuk menjamin keamanan dan Kenyamanan Pelabuhan Penyeberangan;
5. Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Kapal sebelum Berangkat
6. Tindaklanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan.

- **Faktor Kendala**

1. Kurang nya Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
2. Pemerintah tidak bisa menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan;
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam mengelola Pelabuhan Penyeberangan;
4. Kurangnya aktifitas pembangunan untuk menunjang operasional Pelabuhan Penyeberangan;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{IKK1.5 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi} = 13 \text{ Lokasi} = 86,67\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{13}{15} \times 100\% = 86,67\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2.701.640.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 196.326.700 atau mencapai 7%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan dilakukan perbaikan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya Pelabuhan Penyeberangan yang Aman dan Nyaman;
2. Akan dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap Operator Kapal agar tetap mematuhi Kepentingan bersama yaitu "Keselamatan Bersama Dalam Bertransportasi"
3. Akan dilakukan Perbaikan Sistem Informasi untuk meningkatkan Kinerja Pelabuhan Penyeberangan;
4. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

II.3.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A;
IKK2.2 Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A;
IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;

IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang Memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan}} \times 100\%$$

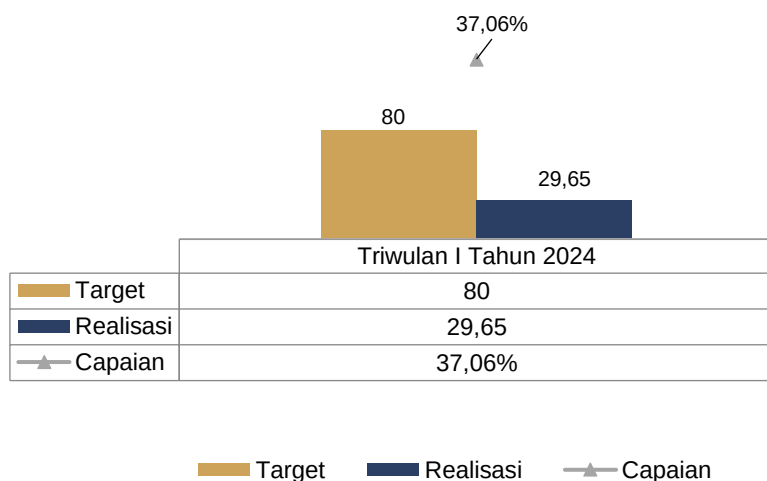
Keterangan :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A saat ini diukur hanya pada 4 Terminal Tipe A yang melayani di antaranya:

1. Terminal Tipe A Tangkoko;
2. Terminal Tipe A Boroko;
3. Terminal Tipe A Malalayang;
4. Terminal Tipe A Bolaang Mongondow

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A sebesar 29,65 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 80 maka Capaian Kinerja mencapai 37,06%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A.



Gambar III.6 Grafik Capaian IKK2.1 Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup Pelayanan Keselamatan, Pelayanan Keamanan, Pelayanan Kehandalan/Keteraturan, Pelayanan Kenyamanan, Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan, Pelayanan Kesetaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 37,06, dimana hal ini ditunjukkan dengan berbagai peningkatan kualitas pelayanan di masing-masing terminal Tipe-A di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat memiliki target presentase 80 % yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Terminal Tipe A untuk menunjang Operasional Terminal Tipe A;
2. Dilakukan Pemeliharaan Terminal Tipe A secara berkala;
3. Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Terminal Tipe A;
4. Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Terminal Tipe A untuk menjamin Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jasa Terminal Tipe A;
5. Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Bus;

6. Tindaklanjut Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Terminal Tipe A.

- **Faktor Kendala**

1. Tidak terpenuhinya Dokumen Standar Pelayanan sebagai dasar Pelayanan Terminal Tipe A;
2. Tidak Berjalannya SOP pada Terminal Tipe A;
3. Tidak Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Terminal Tipe A;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{24}{7,12} \times 100\% = 29,65\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{29,65}{80\%} \times 100\% = 37,06\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A terhadap pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 0 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 0 atau mencapai 0%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan di lakukan Evaluasi mandiri untuk memastikan Pelaksanaan SPM tetap berjalan sesuai SOP yang ada;
2. Akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi untuk mendukung pelaksanaan SPM berjalan baik, dalam hal penyampaian Biaya/Tarif dan Produk layanan tersampaikan kepada pengguna jasa;
3. Akan tetap terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang bisa di rasakan di Terminal Tipe A;
4. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal

Indikator Kinerja Persentase Penerapan SMART terminal tipe-A tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK2.3 Persentase Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur pada 15 Pelabuhan yaitu 15 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya : Pelabuhan Penyeberangan Bitung, Pelabuhan Penyeberangan Likupang, Pelabuhan Penyeberangan Amurang, Pelabuhan Penyeberangan Lembeh, Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau, Pelabuhan Penyeberangan Pananaru, Pelabuhan Penyeberangan Melonguane, Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang, Pelabuhan Penyeberangan Biaro, Pelabuhan Penyeberangan Marampit, Pelabuhan Penyeberangan Lirung, Pelabuhan Penyeberangan Mangaran, Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso, Pelabuhan Penyeberangan Marore, dan Pelabuhan Penyeberangan Miangas. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

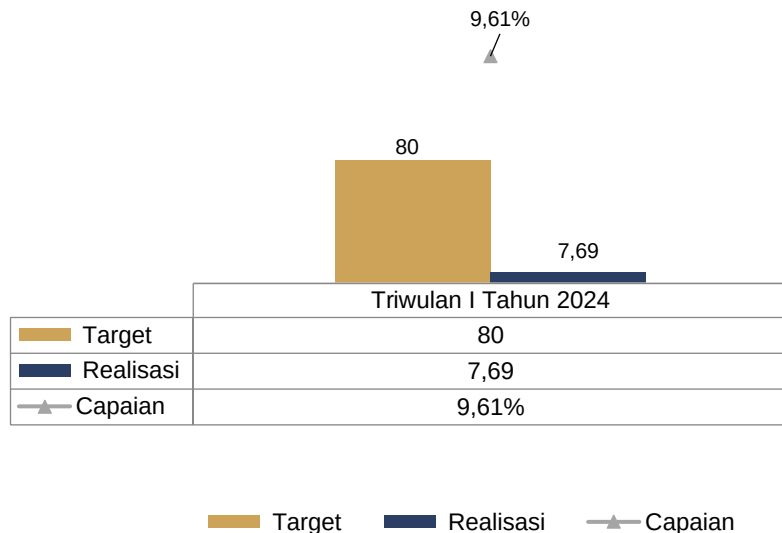
Keterangan :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 13 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani di antaranya:

1. Pelabuhan Penyeberangan Bitung;
2. Pelabuhan Penyeberangan Likupang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Amurang;
4. Pelabuhan Penyeberangan Lembeh;
5. Pelabuhan Penyeberangan Pananaru;
6. Pelabuhan Penyeberangan Melonguane;
7. Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang;
8. Pelabuhan Penyeberangan Biaro;
9. Pelabuhan Penyeberangan Marampit;
10. Pelabuhan Penyeberangan Mangaran;
11. Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso;
12. Pelabuhan Penyeberangan Marore;
13. Pelabuhan Penyeberangan Miangas;

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 7,69 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 80 maka Capaian Kinerja mencapai 9,61%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK1.2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP



Gambar III.7 Grafik Capaian IKK2.3 Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, pada Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 80% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat memiliki target presentase 80% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Dilaksanakannya pengawasan inventarisir kebutuhan Pelabuhan Penyeberangan untuk menunjang Operasional Pelabuhan SDP;
2. Dilakukan Pemeliharaan Pelabuhan SDP secara berkala;
3. Pemenuhan SDM yang berkualitas untuk operasional Pelabuhan SDP;
4. Perbaikan Layanan secara menyeluruh terhadap Pelabuhan SDP untuk menjamin Keamanan dan Kenyamanan pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan;
5. Pengawasan terhadap Keselamatan Penumpang dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Kelaikan Kapal;
6. Tindakanjuit Survey Kepuasan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi Pelabuhan Penyeberangan;

- **Faktor Kendala**

1. Tidak terpenuhinya Dokumen Standar Pelayanan sebagai dasar Pelayanan Pelabuhan SDP;
2. Tidak Berjalannya SOP pada Pelabuhan SDP;
3. Tidak Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap Standar Pelayanan Pelabuhan SDP;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebagai berikut :

$$KK1.1 = \frac{1}{13} \times 100\% = 7,69\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{7,69\%}{80\%} \times 100\% = 9,61\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 0 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 0 atau mencapai 0 %

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan di lakukan Evaluasi mandiri untuk memastikan Pelaksanaan SPM tetap berjalan sesuai SOP yang ada;
2. Akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi untuk mendukung pelaksanaan SPM berjalan baik, dalam hal penyampaian Biaya/Tarif dan Produk layanan tersampaikan kepada pengguna jasa;
3. Akan tetap terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang bisa di rasakan di Terminal Tipe A;
4. Berkoordinasi dengan kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran sesuai dengan target atau capaian.

IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a. Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100$$

Keterangan:

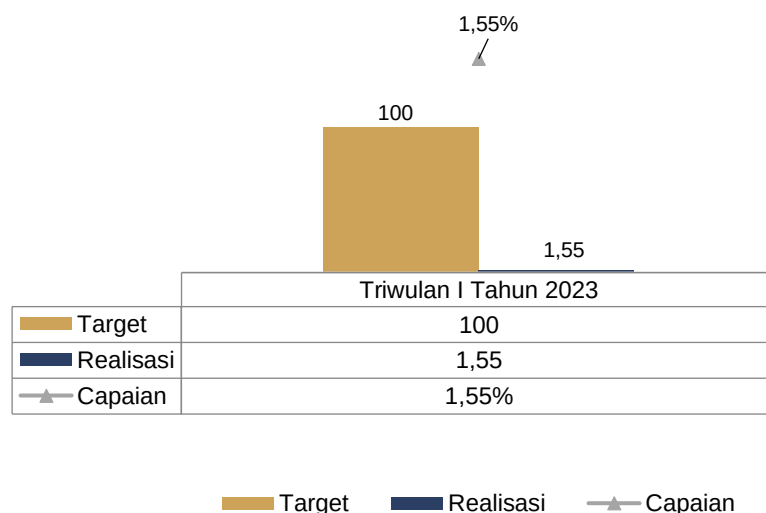
Ruas Jalan yang telah Terpasang Perlengkapan Jalan

1. Kairagi – Mapanget (Manado)
2. Kairagi – Batas Kota Manado (Manado)
3. Kauditan – Batas Kota Manado (Minut)
4. Batas Kota Manado - Airmadidi
5. Airmadidi - Kauditan
6. Batas Kota Manado – Tomohon (Minahasa/Tomohon)
7. Batas Kota Tondano- Tomohon (Minahasa/Tomohon)
8. Tondano – Waisan – Kakas – Langowan – Kawangkoan (Minahasa)
9. Worocitan – Poopo (Min-Sel)
10. Poopo – Sinsir (Min-Sel)
11. Sinisir – Batas Kotamobagu (Boltim)
12. Matali – Torosik (Bolsel/Bolmong)
13. Kema – Rumbia (Minahasa)
14. Molobog – Onggunoi (Boltim)
15. Biontong – Atingola Torosik (Bolmut)

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Jalan Terpasang	Total Persentase Jenis
1	Marka Jalan	6750	0	0%
2	Paku Jalan	2120	0	0%
3	Alat Pemberi Isyarat	0	0	0%
4	Rambu Standart	280	0	0%
5	RPPJ	12	0	0%
6	Pagar Pengaman	400	0	0%
7	Warning Light	2	0	0%
8	PJU Solar Cell	212	152	71,70%
9	PJU Listrik	0	0	0%
Total Capaian Keseluruhan		9776	152	1,55%

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 1,55 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 100 maka Capaian Kinerja mencapai 1,55%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



Gambar III.8 Grafik Capaian IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4357/UM.303/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Teknis Bidang Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota. Dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara, pada Indikator Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap

Kondisi Ideal memiliki persentase capaian sebesar 1,55% yang menunjukkan bahwa realisasi Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target presentase 100% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Dapat menjadi petunjuk/pemberi informasi kepada pengguna jalan;
2. Membantu penerangan di lokasi jalan nasional;
3. Meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan;
4. Kualitas mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi;

- **Faktor Kendala**

1. Jika ada material yang tidak sesuai spesifikasi;
2. Sering di curi/di rusak (baterai PJU/WL, stiker scotlight);
3. Petunjuk/informasi sering diabaikan oleh pengguna jalan;
4. Titik pemasangan faskes sering berubah-ubah;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK1.1 = \frac{152}{9776} \times 100\% = 1,55\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada Kondisi Ideal terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{1,55\%}{100\%} \times 100\% = 1,55\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 25.269.005.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 2.132.513.075 atau mencapai 8%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalanserta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.
4. Melaksanakan update pemasangan faskes secara berkala;
5. Melaksanakan pergantian faskes yang sudah rusak secara berkala;

IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a. Definisi Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB disbanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB;

Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB melalui aplikasi JTO.

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat berdasarkan Jumlah Tindakan Petugas dan Jumlah Pelanggaran ODOL dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kendaraan Barang Yang Melakukan Pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang Masuk Pada UPPKB}} \times 100\%$$

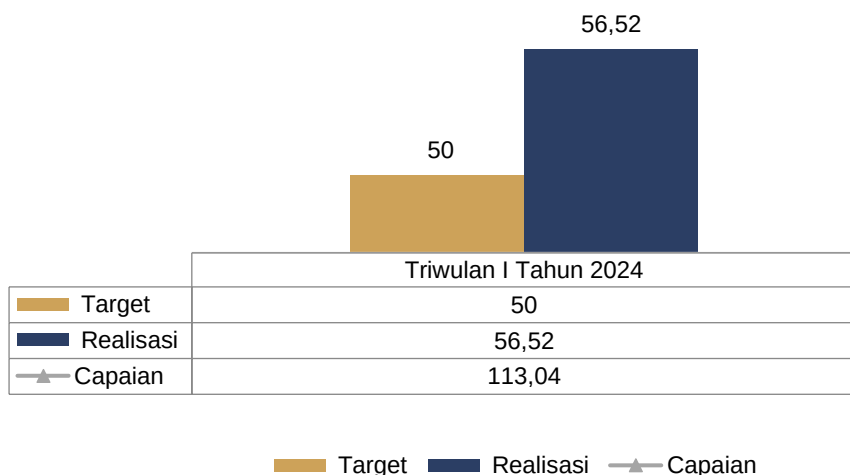
Keterangan:

UPPKB yang menerapkan penindakan ODOL:

1. UPPKB Wangurer Bitung
2. UPPKB Inobonto

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 56,52% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 50 % maka Capaian Kinerja mencapai 113,04%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar III.9 Grafik Capaian IKK3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Kondisi Ideal terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target presentase 50% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Memiliki SDM yang berkompeten;
2. Fasilitas penunjang alat JTO yang ada;
3. Telah dilaksanakan penindakan pelanggaran berupa transfer muatan barang, penurunan muatan barang, putar balik kendaraan atau penundaan perjalanan kendaraan yang melebihi kapasitas daya angkut;
4. Kegiatan target LHR angkutan barang terpenuhi;

• Faktor Kendala

1. Tidak ada pendampingan dari instansi terkait seperti. POLRI dan TNI. Sering di curi/di rusak (baterai PJU/WL, stiker scotlight);
2. Banyak kendaraan angkutan barang belum mempunyai buku uji elektronik;

3. Banyak kendaraan yang menunggu atau lewat jalan belakang untuk menghindari UPPKB;
4. Kegiatan di siang dan malam kendala ada beberapa kali pengemudi ingin menabrak petugas pengaturan lalin yg di jalan;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK4.2 = \frac{2847}{5037} \times 100\% = 56,52\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Pada Kondisi Ideal terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{56,52}{50} \times 100\% = 113,04\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp3.486.880.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp526.164.850 atau mencapai 15%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi/memberikan edukasi peraturan terkait kepada para pengusaha jasa angkutan barang, dll untuk menekan jumlah pelanggaran;
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan patrol/piket serta kegiatan penegakan hukum lainnya untuk mendorong efektifitas kegiatan gakum serta memberikan efek jera kepada kendaraan yang masih melakukan pelanggaran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan penindakan pelanggar pada UPPKB di lingkungan BPTD Kelas II Sulawesi Utara;

IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, Dan Batas Kecepatan

Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS dan Batas Kecepatan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara. Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

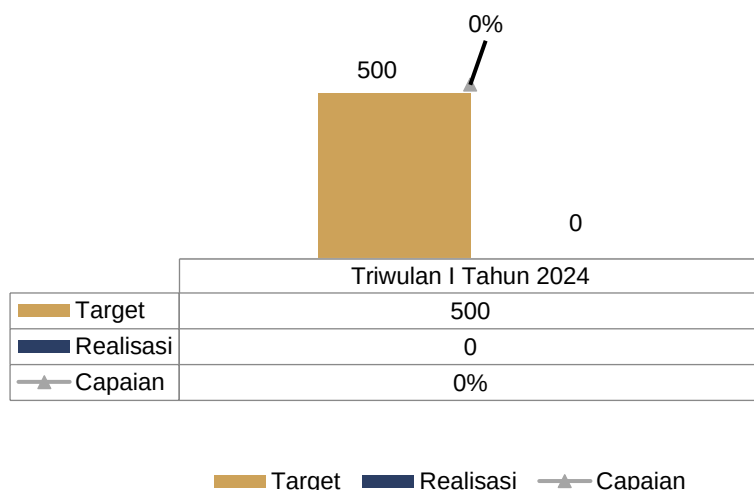
$$= \text{Jumlah Kumulatif Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi Pada PNKJ}$$

Keterangan

Sosialisasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 0 orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 500 orang maka Capaian Kinerja mencapai 0%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.



Gambar III.10 Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan transportasi jalan untuk menanamkan dan membangun pemahaman kesadaran dalam berperilaku tertib berlalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Terhadap Kondisi Ideal terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target 500 orang tersosialisasi yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Tersosialisasinya Masyarakat akan pentingnya Keselamatan Transportasi Jalan;
2. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah;
3. Tindaklanjut hasil sosialisasi terhadap pengguna jasa;

- **Faktor Kendala**

1. Tidak Tersosialisasinya kepada masyarakat dikarenakan faktor kegiatan tidak sesuai;
2. Kurangnya persiapan sehingga kegiatan tidak terlaksana dengan baik;
3. Kurangnya Sosialisasi pada masyarakat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

IKK3.5 = 0 orang

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{0\%}{100\%} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp 350,000,000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp 0 atau mencapai 0%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan Sosialisasi yang telah diamanatkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan disesuaikan dengan anggaran yang telah di anggarkan pada Pagu Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara;
2. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk kelancaraan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Nasional;
3. Berkoordinasi dengan Kantor KPPN terkait dengan rencana daya serap penggunaan anggaran tahun 2024 sesuai dengan target dan capaian terbaru.

IKK3.6 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor : KP 4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

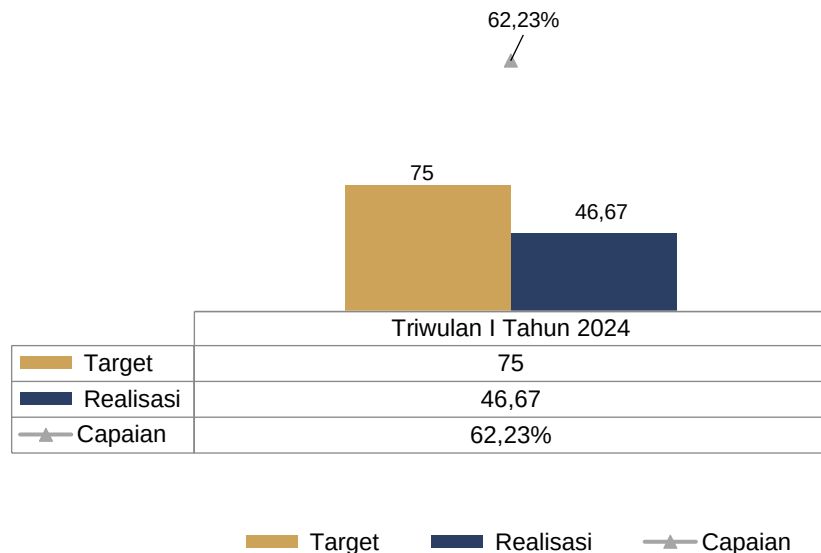
$$= \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (DKI Jakarta + Kota + Kabupaten) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

Keterangan

No	UPUBKB Terakreditasi	No	UPUBKB Belum Terakreditasi
1	UPUBKB Kota Tomohon	1	UPUBKB Kabupaten Minahasa Utara
2	UPUBKB Kota Kotamobagu	2	UPUBKB Kabupaten Minahasa Tenggara
3	UPUBKB Kabupaten Minahasa	3	UPUBKB Bolaang Mongondow Selatan
4	UPUBKB Kabupaten Minahasa Selatan	4	UPUBKB Bolaang Mongondow Timur
5	UPUBKB Kabupaten Bolaang Mongondow	5	UPUBKB Bolaang Mongondow Utara
6	UPUBKB Kota Manado	6	UPUBKB Kabupaten Kepulauan Talaud
7	UPUBKB Kep. Sitaro	7	UPUBKB Kabupaten Kepulauan Sangihe
		8	UPUBKB Kota Bitung
Total UPUBKB : 15			
Total UPUBKB Terakreditasi : 7			
Total UPUBKB Belum Terakreditasi : 8			

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 47% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 75% orang maka Capaian Kinerja mencapai 62,67%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



Gambar III.11 Grafik Capaian IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor : KP 4404/AJ.502/DRJD/2020.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Kondisi Ideal terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target 75% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Menjamin keselamatan kendaraan yang telah berhasil lulus persyaratan teknis dan lain jalan;.
2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan; dan
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

• Faktor Kendala

1. Tidak adanya pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Angkutan Umum di Daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dikarenakan minimnya Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan BPTD;
2. Masih banyaknya praktek pemalsuan kartu uji dan sertifikat;

3. Masih banyak pemilik kendaraan yang tidak mau melakukan uji berkala;
4. Kurangnya kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

$$IKK3.7a = \frac{7}{15} \times 100\% = 46,67\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{47\%}{75\%} \times 100\% = 62,63\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp300.000.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp0 atau mencapai 0%.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memastikan dan mengupayakan unit pengujian kendaraan bermotor telah menggunakan alat uji yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga kendaraan bermotor dapat di uji secara akurat demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
2. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pengawasan secara berkala;
3. Peningkatan standarisasi kendaraan bermotor di tingkatkan pada simpul yang telah ditetapkan.

IKK3.7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a. Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Dan perencanaan anggaran

b. Aspek Kepegawaian (SDM);

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

c. Aspek Keuangan;

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan,

d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	
	1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10	
	2 Perjanjian Kinerja	5	
	3 Pengisian input e-planning	5	
	4 pengisian input e-performance	5	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
	1 Kualifikasi (Pendidikan Format Terakhir)	6	
	2 Kompetensi	10	
	3 Kinerja	8	
	4 Disiplin	1	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
JUMLAH NILAI			

Keterangan

kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri atas 4 aspek :

a. aspek perencanaan

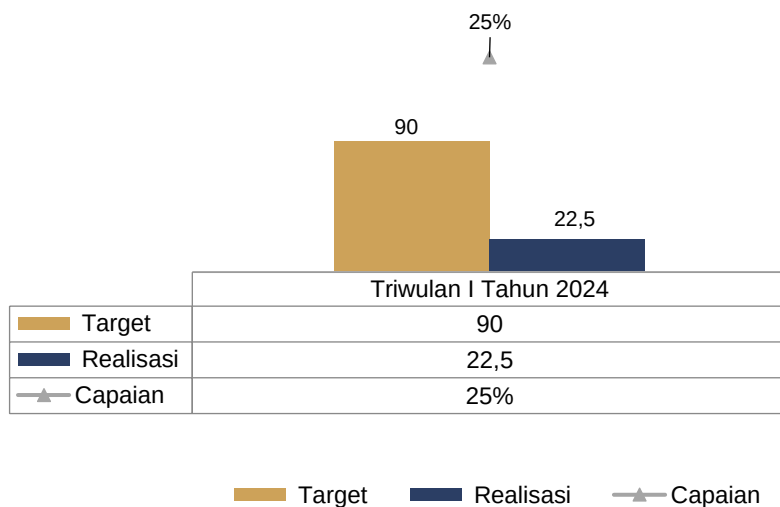
b. aspek kepegawaian

c. aspek keuangan

d. penyelenggaraan perkantoran.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 22,5 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 90 maka Capaian Kinerja mencapai 25%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK5. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



Gambar III.13 Grafik Capaian IKK 3.7b Jumlah Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 mempunyai nilai 90. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat hampir memenuhi target yang ditetapkan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target 90% yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

• Faktor Keberhasilan

1. Dokumen LKIP dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun dan dikumpulkan tepat Waktu;

2. Penginputan data pada aplikasi E-Performance setiap bulan dilaksanakan tepat waktu;
3. Pengumpulan Laporan Bulanan pegawai tepat waktu;
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai;
5. Tercapainya Tingkat Penyerapan daya serap yang telah di targetkan;

- **Faktor Kendala**

1. Pengumpulan Draft Perjanjian Kinerja setiap Kepala Seksi sering mengalami Keterlambatan;
2. Realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan;
3. Surat perintah membayar di tolak oleh KPPN dikarenakan data dukung pengajuan tidak lengkap
4. pencairan dana termin kegiatan fisik tidak sesuai dengan jadwal pencairan.

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	5,625
	1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10	2,25
	2 Perjanjian Kinerja	5	1,125
	3 Pengisian input e-planning	5	1,125
	4 pengisian input e-performance	5	1,125
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	5,625
	1 Kualifikasi (Pendidikan Format Terakhir)	6	1,35
	2 Kompetensi	10	2,25
	3 Kinerja	8	1,8
	4 Disiplin	1	0,225
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	5,625
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	5,625
JUMLAH NILAI			22,5

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{22,5}{90} \times 100\% = 25\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai

Rp4.349.538.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp1.243.091.198 atau mencapai 29%.

5. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menginput Realisasi kegiatan pada aplikasi e-performance dan menyusun Dokumen SAKIP sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan anggaran yang tersedia agar realisasi anggaran terserap sengan target yang di tentukan;
3. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis;

IKK1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2 Rata-rata Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (Nilai x)	20	
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (Nilai y)	15	
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (Nilai z)	15	
JUMLAH NILAI			
JUMLAH CAPAIAN			

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

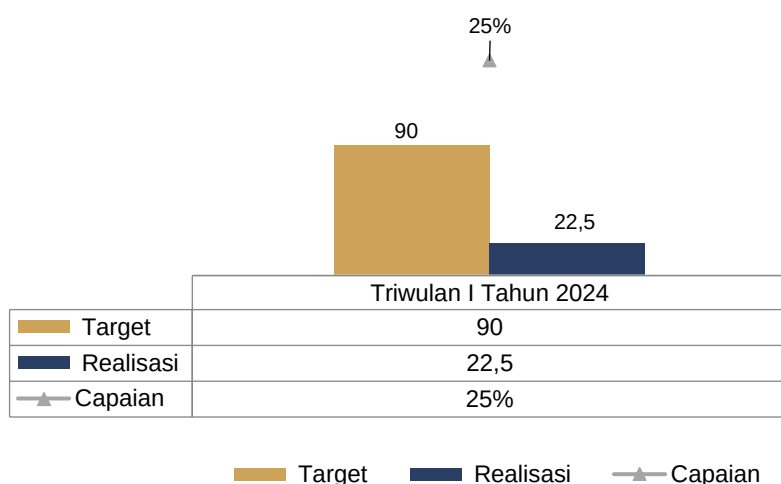
$$x = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$x = \frac{\text{Rata - Rata kecepatan internet (Unduh) di Kantor}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduk) di kantor}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap PK Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 22,5 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 sebesar 90 maka Capaian Kinerja mencapai 25%, Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK5. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



Gambar III.14 Grafik Capaian IKK 3.7b Jumlah Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

c. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara mempunyai nilai 90. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat hampir memenuhi target yang ditetapkan.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat memiliki target 90 yang di peroleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya berdasarkan arahan pimpinan pada renstra 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
2. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran;
3. Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu

- **Faktor Kendala**

1. Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan yang baik harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya di tindaklanjuti;
3. Belum optimalnya sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD;

- **Realisasi Kinerja**

Sehingga Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	5,625
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	3,375
	2 Rata-rata Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV	10	2,25
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	5,625
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	11,25
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (Nilai x)	20	4,5
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (Nilai y)	15	3,375
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (Nilai z)	15	3,375
JUMLAH NILAI			22,5
JUMLAH CAPAIAN			25%

$$IKK3.7b = \frac{22,5}{90} \times 100\% = 25\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Pada terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\% \text{Capaian} = \frac{22,5}{90} \times 100\% = 25\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun Anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu dengan Pagu Anggaran senilai Rp18.217.949.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2024 Rp6.183.226.791 atau mencapai 34%

4. **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas meja dan kursi;
2. Menambah fasilitas meja dan kursi sesuai jumlah pegawai;
3. Meningkatkan fasilitas internet kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai;
4. Mengoptimalkan sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD.

II.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

II.4.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp134.396.954.000.-** dengan rincian per Sumber Dana Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.1 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

Sumber Dana	Anggaran	%
RM	Rp. 129.396.954.000	96.28%
PNBP	Rp. 5.000.000.000	3.72%
SBSN	Rp.	%
PHLN	Rp.	%
TOTAL	Rp. 134.396.954.000	100.00%

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp134.396.954.000.-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II. 2 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran	%
Belanja Pegawai	Rp. 10.316.509.000	7.68%
Belanja Barang	Rp. 91.873.045.000	68.36%
Belanja Modal	Rp. 32.207.400.000	23.96%
Total	Rp. 134.396.954.000	100.00%

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi Ke 04 Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 April 2023 Nomor SP DIPA - 022.03.2.403864/2023 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

Tabel II. Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

	SUMBER DANA				JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	PHLN	
PAGU AWAL	129.396.954.000	5.000.000.000	-	-	134.396.954.000
REVISI KE-1	129.396.954.000	5.000.000.000	-	-	134.396.954.000
REVISI KE-2	129.396.954.000	5.000.000.000	-	-	134.396.954.000
REVISI KE-3	129.396.954.000	5.000.000.000	-	-	134.396.954.000
REVISI KE-4	129.396.954.000	5.000.000.000	-	-	134.396.954.000

b. Rincian Revisi Per Sumber Jenis Belanja Tahun 2024

Tabel II. Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	10.316.509.000	91.873.045.000	32.207.400.000	134.396.954.000
REVISI KE-1	10.316.509.000	91.873.045.000	32.207.400.000	134.396.954.000
REVISI KE-2	10.316.509.000	91.873.045.000	32.207.400.000	134.396.954.000
REVISI KE-3	10.316.509.000	91.873.045.000	32.207.400.000	134.396.954.000
REVISI KE-4	10.316.509.000	91.873.045.000	32.207.400.000	134.396.954.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

Tabel II Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	10.316.509.000	-	10.316.509.000
Belanja Barang	91.873.045.000	-	91.873.045.000
· RM	91.873.045.000		91.873.045.000
· PNBP			
Belanja Modal	32.207.400.000	-	32.207.400.000
· RM	27.207.400.000		27.207.400.000
· PNBP	5.000.000.000		5.000.000.000
· SBSN			
· PHLN			
TOTAL	134.396.954.000		134.396.954.000

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel II Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

NOMENKLATUR PROGRAM	Pagu Awal	Pagu Per Triwulan II	Triwulan II	
	(Juta)	(Juta)	Realiasi	(%)
Ditjen Perhubungan Darat				
Program Infrastruktur Konektivitas	116.229.005.000	116.229.005.000	47.614.618.648	43.87%
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	59.800.820.000	59.800.820.000	11.160.229.061	22.58%
Pelayanan Transportasi Darat	15.977.901.000	15.977.901.000	7.127.181.087	37.92%
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36.100.746.000	36.100.746.000	26.910.980.500	74.80%
Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.349.538.000	4.349.538.000	2.416.228.000	55.55%
Program Dukungan Manajemen	18.167.949.000	18.167.949.000	9.707.768.103	54.79%
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	100.000.000	100.000.000	98.700.000	98.70%
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.751.440.000	7.751.440.000	4.598.253.521	59.32%
Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN. dan Umum Transportasi Darat	10.316.509.000	10.316.509.000	5.010.814.582	50.79%

Sumber : Bagian Keuangan BPTD Kelas II Sulawesi Utara.

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2024. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 46 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024 (Triwulan I)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	146.153.422.000	155.185.085.000	153.297.639.593	98.78%
2	2021	148.314.891.000	103.755.497.000	103.636.220.608	99.89%
3	2022	134.263.813.000	130.184.749.000	129.879.050.101	99.77%
4	2023 (TW 1)	134.396.954.000	134.396.954.000	19.081.830.824	15.11%
5	2023(TW II)	134.396.954.000	134.396.954.000	57.322.386.751	45.40%

Sumber : Bagian Keuangan BPTD Kelas II Sulawesi Utara

II.4.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

Nomenklatur Program	Pagu Awal	Pagu Per Triwulan II	Triwulan II	
			Realiasi	
	(Juta)	(Juta)	(Juta)	%
Ditjen Perhubungan Darat				
Program Infrastruktur Konektivitas	116.229.005.000	116.229.005.000	47.614.618.648	43.87%
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	59.800.820.000	59.800.820.000	11.160.229.061	22.58%
Pelayanan Transportasi Darat	15.977.901.000	15.977.901.000	7.127.181.087	37.92%
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	36.100.746.000	36.100.746.000	26.910.980.500	74.80%
Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.349.538.000	4.349.538.000	2.416.228.000	55.55%
Program Dukungan Manajemen	18.167.949.000	18.167.949.000	9.707.768.103	54.79%
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.751.440.000	7.751.440.000	4.598.253.521	59.32%
Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN. dan Umum Transportasi Darat	10.316.509.000	10.316.509.000	5.010.814.582	50.79%

Sumber : Bagian Keuangan BPTD Kelas II Sulawesi Utara

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan I Tahun 2024. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	%
1	Belanja Pegawai	10.316.509.000	5.010.814.544	48.57%
2	Belanja Barang	91.873.045.000	33.057.835.919	35.98%
3	Belanja Modal	32.207.400.000	19.250.073.250	59.77%
TOTAL		134.396.954.000	57.318.723.713	42.65%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 57.318.723.713- atau sebesar 42.65%

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I Tahun 2024

Tabel II. Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp. (ribu)	Rp. (ribu)	%
1	RM	129.396.954.000	56.188.436.463	43.42%
2	PNBP	5.000.000.000	1.130.287.250	22.61%
3	SBSN			
4	PHLN			
TOTAL		134.396.954.000	57.318.723.713	42.65%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Triwulan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 57.318.723.713- atau sebesar 42.65%

3. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Kegiatan terblokir dengan rincian sebagai berikut

RM : Rp. 1.816.890.000

PNBP : Rp. -

SBSN : Rp. -

PHLN : Rp. -

II.4.3. Alokasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program Triwulan I Tahun 2024. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Program		Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Triwulan I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	78,14%	11,02	67,12%
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	24,85%	0%	24.85%
3	SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	44,31%	5,75%	38,56%
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	25%	29%	-4%
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	25%	34%	-9%
Rata-Rata			39,46%	15,95%	23,50%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **39,46%**. dengan realisasi anggaran sebesar **15,95%** menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar **23,50%**.

2. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Terdapat pagu blokir atau auto adjustment yang mempengaruhi proses revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
2. Terdapat realokasi anggaran yang memerlukan waktu untuk melakukan revisi anggaran
3. Adanya realokasi anggaran yang mempengaruhi perubahan pada target realisasi daya serap
4. Prosedur dan proses revisi anggaran yang membutuhkan data dukung dan cukup memakan waktu
5. Terjadinya addendum kegiatan yang mempengaruhi ketepatan target dalam penyelesaian dan realisasi kegiatan



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. PENUTUPAN

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Sulawesi Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2024 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Program (IKP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara Triwulan I tahun 2024, terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau dengan 100%(IKP $\geq$ 100%) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program kurang dari 100%(0 $\leq$ IKP $\leq$ 100%). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 24,03% (target 100%) tercapai 24,03%;
2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda terealisasi sejumlah 3 lokasi (target 3 lokasi) tercapai 100%;
3. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sejumlah 4 Terminal (target 5 Terminal) tercapai 80%;
4. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% (Target 100%) tercapai 100%;
5. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebanyak 13 Pelabuhan Penyeberangan (Target 15 Lokasi) Tercapai 86,67%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A terealisasi sebesar 32,07 % (Target 80%) Tercapai 40,09%;

7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Terealisasi sebesar 7,69% (Target 80%) Tercapai 9,61%;
8. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Terealisasi sebesar 1,55% (Target 100%) Tercapai 1,55%;
9. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Terealisasi sebesar 56,52% (Target 50%) Tercapai 113,04% dikarenakan terjadi kelebihan pelanggaran yang terjadi;
10. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Terealisasi sebesar 0 orang (Target 500 Orang) Tercapai 0%;
11. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Terealisasi sebesar 46,67% (Target 75%) Tercapai 62,23%;
12. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Terealisasi sebesar 22,5 (Target 90) Tercapai 25%;
13. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Terealisasi sebesar 22,5 (Target 90) Tercapai 25%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara ;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	24,03	24,03%	BELUM TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	-Seksi Lalin -Seksi Sarana
			IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	lokasi	3	3	3	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan atau monitoring jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda agar simpul yang di tetapkan terlayani dengan sesuai.	- Seksi Prasarana - Seksi Lalin

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 1.3	Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	5	5	4	80%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A	Seksi Prasarana
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanankeperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yangberoperasi	lokasi	15	15	13	86,67%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan	Seksi Prasarana

											tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan.	
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A	%	80	80	32,07	40,09%	BELUM TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	7,69	9,61%	BELUM TERCAPAI	1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; 3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; 4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	1,55	1,55%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala terhadap ketepatan jadwal pemasangan peralatan. 2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan terkait pemasangan.	Seksi Lalin

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	50	56,52	113,04%	TERCAPAI	akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB	Seksi Prasarana
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisitentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	500	0	0%	Belum Tercapai (dilaksanakana saat PNKJ)	Kegiatan Pekan Keselamatan Telah Terlaksana sesuai target	Seksi Sarana
			IKP 7a	Persentase Standarisasi pengujianberkala kendaraan bermotor	%	75	75	46,67	62,23%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Kalsel; 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa ndukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukunganteknis transportasi darat	nilai	90	90	22,5	25%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan Peningkatan motivasi bagi pegawai bptd Sulawesi Utara; 2. Melakukan Pengiriman pegawai diklat 3. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 4. Melakukan Penyusunan saking, spip, lkip, profil bptd 5. Melakukan Rapat teknis/ koordinasi/ konsolidasi 6. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 7. Melakukan Monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat 8. Melakukan Monitoring dan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat 9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun 10. Melakukan Penilaian andalalin di provinsi kalimantan selatan 11. Melakukan Biaya penyidikan dan pendampingan pasal 277 uu 22 tahun 2009 tentang Ila 12. Melakukan Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan bidang	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha

											13. Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja angkutan komersil dan perintis 14. Melakukan Monitoring alur pelayaran sungai dan danau (das barito dan danau riam kanan) 15. Melakukan Monitoring dan pelayanan transportasi sdp 16. Melakukan Pendataan dan pengukuran kapal sungai dan danau 17. Melakukan Ramp check kapal penyeberangan 18. Melakukan Monitoring dan pengawasan pemenuhan spm kapal 19. Melakukan Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana ditjen perhubungan darat 20. Melakukan Inhouse consultant	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	90	90	22,5	25%	BELUM TERCAPAI	Managemen terhadap SDM pegawai BPTD Kelas II Sulawesi Utara	Subbag Tata Usaha



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III



Rencana Kinerja Tahunan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ahmad Zunanto Sofyan Efendi, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/1/2024	
2.	Dikonsep	Zulfikar Adhitya Kusuma, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/1/24	
3.	Dikonsep	Alexandro J. Pua	Administrasi Perkantoran Subbagian Tata Usaha	26/1/24	
4.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/1/24	
5.	Disetujui	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/1/24	
6.	Disetujui	Yanuar Efan Thamrin, ST, M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	
7.	Disetujui	Fadjar Rijadi, ST., MT	Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	
8.	Disetujui	Dharmawanto, S.T., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXII
PROVINSI SULAWESI UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	5
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500

		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	75
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Manado, 08 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Utara



MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002



Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ahmad Zunanto Sofyan Efendi, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/01/2024	
2.	Dikonsep	Zulfikar Adhitya Kusuma, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/01/24	
3.	Dikonsep	Alexandro J. Pua	Administrasi Perkantoran Subbagian Tata Usaha	26/01/24	
4.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/1/24	
5.	Disetujui	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/1/24	
6.	Disetujui	Yanuar Efan Thamrin, ST, M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	
7.	Disetujui	Fadjar Rijadi, ST., MT	Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	
8.	Disetujui	Dharmawanto, S.T., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/1/24	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mangasi Sinaga, SE., SH., MM.
Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024
SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	3
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80
SK.4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500

		IKK 3.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	75
SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1.	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat
6. Pengelola Organisasi dan SDM Transportasi Darat
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat

Anggaran

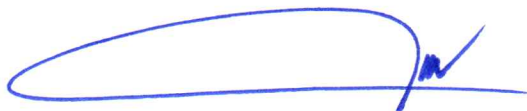
Rp90.727.436.000
Rp98.413.402.000
Rp32.068.780.000
Rp4.349.538.000
Rp150.000.000
Rp7.751.440.000
Rp10.316.509.000

Disetujui

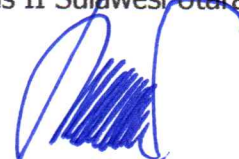
Manado, 08 Januari 2024

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Utara



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



MANGASI SINAGA, SE., SH., MM.
NIP. 19680729 199703 1 002



Rencana Aksi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara

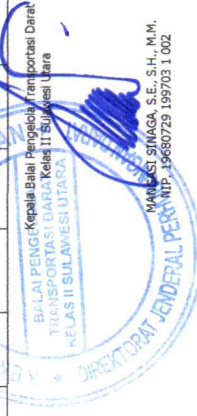
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI TAHUN 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Ahmad Zunanto Sofyan Efendi, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/01 2024	
2.	Dikonsep	Zulfikar Adhitya Kusuma, A.Md	Pengelola Kepegawaian	26/01 2024	
3.	Dikonsep	Alexandro J. Pua	Administrasi Perkantoran Subbagian Tata Usaha	26/01/24	
4.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/01 2024	
5.	Disetujui	Adi Prabowo, S.KOM, M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha	26/01 2024	
6.	Disetujui	Yanuar Efan Thamrin, ST, M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/01/24	
7.	Disetujui	Fadjar Rijadi, ST., MT	Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/01/24	
8.	Disetujui	Dharmawanto, S.T., M.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan	26/01/24	

RENCANA AKSI (RENAKSI) TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83,0	91,3	100	Rp6,275,843,000,-	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
	IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	5	Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Rp3,281,974,000,-	Seksi Prasarana
	IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	5	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Rp7,597,423,000,-	Seksi Prasarana
	IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83,0	91,3	100	Rp53,113,818,000,-	- Seksi Lalu Lintas - Seksi Sarana
	IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp2,701,640,000,-	Seksi Prasarana
	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7,5	15,0	22,5	30,0	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5	90	Rp7,597,423,000,-	Seksi Prasarana
SK.2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	7,5	15,0	22,5	30,0	37,5	45,0	52,5	60,0	67,5	75,0	82,5	90	Rp2,701,640,000,-	Seksi Prasarana
	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83,0	91,3	100	Rp27,931,900,000,-	Seksi Lalu Lintas
	IKK 3.2 Persentase pengarahan pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	Operasional UPPKB	4,2	8,3	12,5	16,7	20,9	25,0	29,2	33,4	37,5	41,7	45,9	50	Rp3,486,880,000,-	Seksi Prasarana
SK.4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	Penyelenggaraan Pelatn Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	Rp350,000,000,-	Seksi Sarana
	IKK 3.7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	75	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	6,3	12,5	18,8	25,0	31,3	37,5	43,8	50,0	56,3	62,5	68,8	75	Rp300,000,000,-	Seksi Sarana
	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Digen Perhubungan Darat	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	Rp4,349,338,000,-	- Seksi Lalu Lintas - Seksi Sarana - Subbagian Tata Usha
SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Digen Perhubungan Darat	Nilai	90	Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	Rp7,751,440,000,-	Subbagian Tata Usha



MAMUKSI SINAGA, S.E., S.H., M.M.
NIP. 19680729 199703 1 002